

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting yang memainkan peran dalam keberhasilan ekonomi. Dalam mendukung proses pembangunan suatu negara, laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama. Akan tetapi, perempuan seringkali tersisihkan dibanding laki-laki di banyak aspek kehidupan sehari-hari yang salah satunya pada bidang ketenagakerjaan. Pada dasarnya, ketenagakerjaan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan pasar tenaga kerja dengan menggunakan angkatan kerja yang bertambah setiap tahun dan laju pertumbuhan yang meningkat (Idham & Satrianto, 2019).

Persamaan hak antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan ikut sertanya perempuan dalam angkatan kerja maka dapat menjadi penggerak dan pendorong pembangunan suatu negara. Hal tersebut merupakan kunci untuk menuju keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Hidayat & Ash Shidiqie (2024), pekerja perempuan selalu melekat pada perempuan karena faktor budaya. Wanita dewasa menghadapi situasi di mana mereka harus membuat pilihan antara bekerja dan memenuhi kewajibannya setelah menikah. peningkatan yang diharapkan perempuan dalam angkatan kerja

mengakibatkan penurunan pengangguran dan secara tidak langsung memenuhi kondisi ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, tenaga kerja dapat terserap ke dalam aktivitas perekonomian dengan baik tanpa adanya kesenjangan gender. Sayangnya, belakangan ini diskriminasi terhadap perempuan masih banyak dijumpai. Adanya diskriminasi terhadap perempuan akan memunculkan ketimpangan dalam aspek pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan ketimpangan dalam pembangunan dapat terlihat melalui indeks ketimpangan gender (IKG) (BPS, 2019). IKG mencerminkan kesenjangan dalam pembangunan akibat adanya ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk melihat gambaran perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Pulau Jawa selama tujuh tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Rata-rata Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Pulau Jawa

Nama Provinsi	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	0,23	0,3	0,24	0,21	0,19	0,32	0,26
Jawa Barat	0,46	0,51	0,5	0,49	0,49	0,49	0,48
Jawa Tengah	0,31	0,39	0,38	0,37	0,38	0,37	0,34
DI Yogyakarta	0,14	0,22	0,24	0,15	0,25	0,24	0,14
Jawa Timur	0,37	0,48	0,48	0,45	0,46	0,44	0,42
Banten	0,48	0,49	0,5	0,48	0,48	0,48	0,46
Pulau Jawa	0,331	0,399	0,390	0,359	0,375	0,390	0,351

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

BPS membagi IKG terbagi atas empat kelas, yaitu kategori rendah (IKG kurang dari 0,405), menengah bawah (IKG pada rentang 0,405- 0,450), menengah atas (IKG pada rentang 0,450-0,495), dan tinggi (IKG lebih dari 0,495). Perhitungan IKG di Pulau Jawa cenderung berfluktuatif sepanjang tahun 2017-2023, tetapi mengalami trend penurunan dari 0,399 di tahun 2018 menjadi 0,359 di tahun 2020. Pada aspek tenaga kerja yang digambarkan dengan TPAK juga menunjukkan hal yang cukup baik dan mencerminkan terjadi penurunan gap kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2021). Namun seiring berjalannya waktu, IKG di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yang mencapai 0,390. Angka ini meningkat sebesar 4,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,375. Namun, pada tahun 2023, IKG mengalami penurunan menjadi 0,351, disamping itu terdapat 2 provinsi di Pulau Jawa dengan IKG diatas rata-rata nasional dan rata-rata Pulau Jawa yang tergolong IKG menengah atas. Dengan IKG yang fluktuatif setiap tahunnya, hal ini menandakan masih terdapat permasalahan mengenai ketidaksetaraan dalam pemberdayaan dan peran perempuan di Pulau Jawa.

Permasalahan yang tercermin melalui IKG dapat dilihat secara lebih mendalam melalui komponen penyusunnya. BPS (2023) menjelaskan, salah satu komponen tersebut adalah status ekonomi yang dilihat melalui partisipasi pada pasar tenaga kerja, diukur menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin. Permasalahan yang selalu muncul dalam bidang ini yakni angka TPAK perempuan yang masih berada di

bawah TPAK laki-laki, bahkan perbedaanya cukup jauh dan tidak pernah mengerucut (Septiawan & Wijaya, 2020).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dihitung sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (Davani & Sulistyaningrum, 2023). Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam angkatan kerja. Adapun rata-rata perkembangan TPAK di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rata-rata Perkembangan TPAK di Pulau Jawa

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
	Laki-laki	Perempuan
2018	81,75	51,70
2019	82,47	52,26
2020	81,44	53,22
2021	81,56	53,39
2022	82,89	53,46
2023	83,54	54,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki secara keseluruhan mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, sementara perempuan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dari tahun 2018 hingga 2023, proporsi TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada

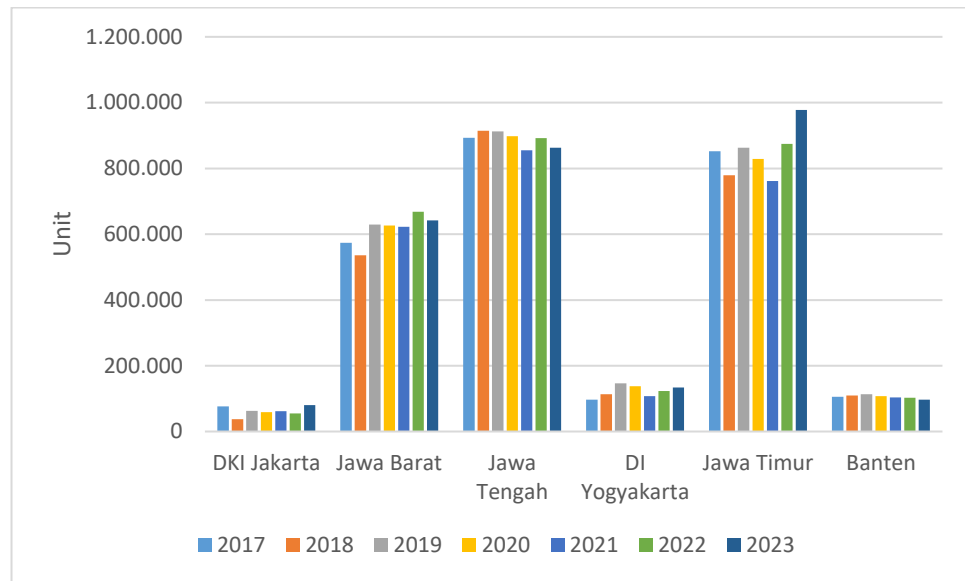
tahun 2023, rata-rata TPAK laki-laki mencapai 83,54%, sedangkan TPAK perempuan hanya mencapai 54,57%. Kesenjangan ini dapat menjelaskan fakta bahwa 83 dari 100 laki-laki usia kerja termasuk dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 54 dari 100 perempuan usia kerja (BPS, 2023). Pekerja perempuan selalu melekat pada perempuan karena faktor budaya. Perempuan dewasa menghadapi situasi di mana mereka harus membuat pilihan antara bekerja dan memenuhi kewajibannya setelah menikah. Sulitnya alokasi waktu membuat perempuan memilih untuk keluar dari pekerjaan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Hidayat & Ash Shidiqie, 2024).

Adanya segregasi pekerjaan atau pemisahan berdasarkan gender membuat perempuan terpaksa harus menerima pekerjaan yang kurang produktif. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya peluang perempuan untuk masuk ke pasar tenaga kerja sehingga tenaga kerja perempuan lebih terkonsentrasi pada sektor informal dengan bekerja di rumah atau bekerja di usaha mikro kecil. Di negara berkembang seperti Indonesia, tenaga kerja perempuan cenderung dibatasi terutama di sektor formal (KemenPPA, 2016).

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLPI) dalam Marthalina (2018), Indah Suryadharma Ali mengatakan bahwa tingkat populasi perempuan sebesar 49 persen dari total penduduk Indonesia menunjukkan peluang besar bagi perempuan untuk terlibat aktif, terutama dalam usaha mikro yang sering dimulai dari skala rumahan. Industri Mikro Kecil (IMK) terbukti paling mampu bertahan menghadapi krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang melanda dunia dan Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Dalam keterkaitannya untuk menciptakan lapangan kerja, sifat usaha yang memanfaatkan sumber daya alam lokal, membutuhkan sedikit mendirikan usaha, modal fleksibel, untuk serta menghasilkan produk siap konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, memungkinkan setiap orang dapat membuka usaha atau bekerja di sektor IMK. Termasuk kaum perempuan yang merangkap sebagai ibu rumah tangga dan mengandalkan usaha rumahan yang bersifat tradisional sebagai sumber mata pencaharian (J. Ningrum, 2022).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah usaha, di mana unit usaha mampu memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bertambahnya jumlah tenaga kerja bisa disebabkan karena kenaikan jumlah unit usaha. Hal tersebut disebabkan perusahaan mempergunakan sejumlah tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi pada usahanya (Soca & Woyanti, 2021). Kenaikan unit usaha akan memberikan pengaruh tingginya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah (Amalia & Woyanti, 2020). Dengan demikian, semakin naiknya unit usaha, maka ketersediaan bagi lapangan pekerjaan juga tinggi sebab semakin dibutuhkan penyerapan tenaga kerja. Adapun perkembangan unit usaha pada Industri Mikro Kecil di Pulau Jawa yaitu sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

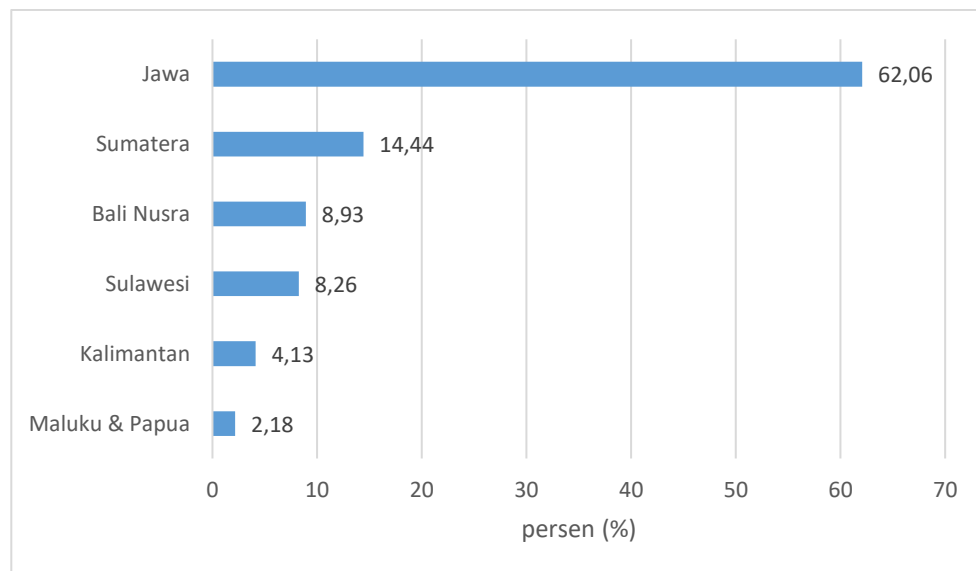
Gambar 1.1

**Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Mikro Kecil di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023 (Unit)**

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa Jumlah unit usaha IMK di Pulau Jawa mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sebaran lokasi usaha IMK terpusat di Pulau Jawa, yaitu sekitar 60,38 persen dari total usaha IMK di seluruh Indonesia. Tiga provinsi besar yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mendominasi sebaran usaha-usaha IMK, dimana masing-masing provinsi memiliki jumlah IMK lebih dari 600 ribu usaha. Sedangkan Jumlah industri mikro kecil (IMK) di DKI Jakarta paling rendah di Pulau Jawa karena beberapa faktor utama. Salah satunya adalah keterbatasan lahan dan tingginya harga sewa atau properti, sehingga pelaku usaha kecil kesulitan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Selain itu, biaya operasional seperti listrik dan transportasi di Jakarta juga lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ditambah lagi, Jakarta lebih didominasi oleh

sektor jasa dan perdagangan besar, sehingga IMK menghadapi persaingan yang cukup berat untuk berkembang.

Pulau Jawa merupakan pusat dalam perekonomian Indonesia karena memberi lebih dari setengah kontribusi dari total PDB Indonesia (Hadist & Utomo, 2021). Adapun persebaran usaha Industri Mikro Kecil (IMK) berdasarkan Pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

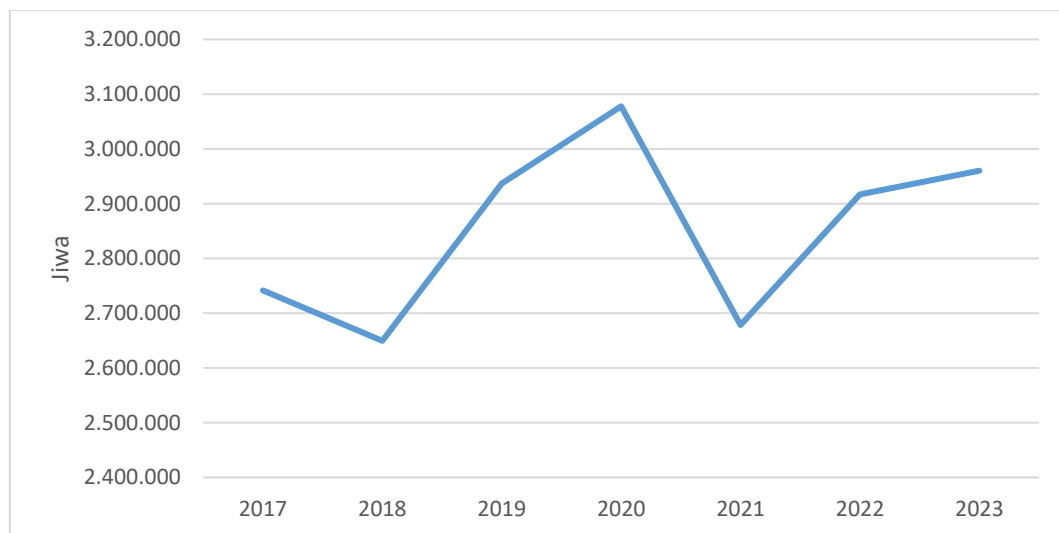
Gambar 1.2

Persebaran Jumlah Usaha Industri Mikro Kecil menurut Pulau (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2, pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 4,5 juta usaha IMK tersebar di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Usaha IMK terpusat di Pulau Jawa, yaitu sekitar 62,06 persen dari total usaha IMK di seluruh Indonesia. Provinsi dengan jumlah usaha IMK terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 21,72 persen, 19,17

persen dan 14,26 persen. Sebaliknya, jumlah usaha IMK di wilayah timur Indonesia merupakan yang paling sedikit, jumlahnya hanya sebesar 2,18 persen.

Usaha IMK juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2023) mempublikasikan bahwa terdapat sebanyak 4.500.584 usaha IMK di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,84 juta orang. Dimana 74,76 persen diantaranya bekerja di Industri Mikro sebanyak 7.359.074 orang (usaha dengan tenaga kerja 1- 4 orang), sedangkan sisanya bekerja di Industri Kecil sebanyak 2.484.766 orang (usaha dengan tenaga kerja 5- 19 orang). Tenaga kerja IMK terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu sekitar 6,33 juta orang. Adapun perkembangan tenaga kerja perempuan pada Industri Mikro Kecil (IMK) di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

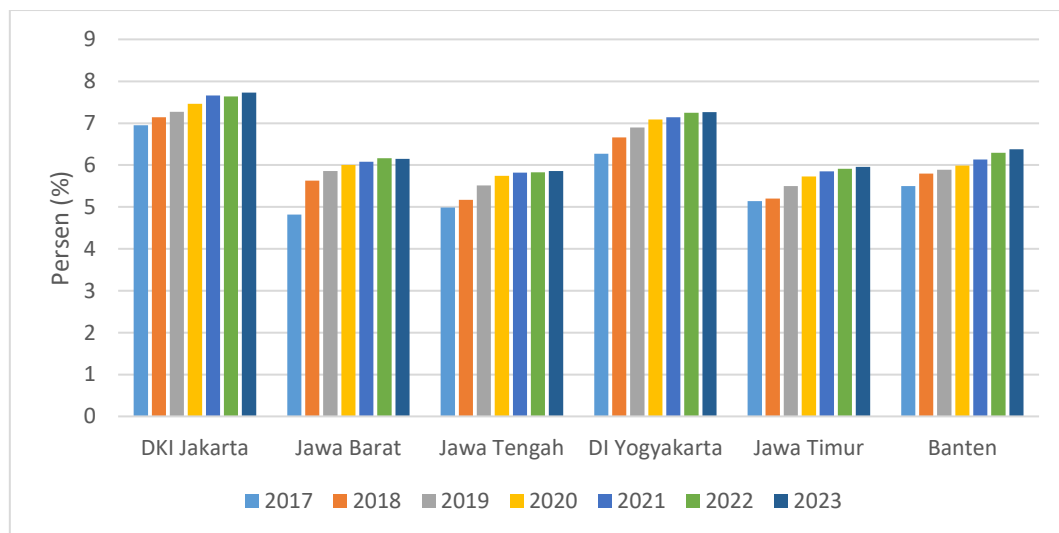
Gambar 1.3

Perkembangan Tenaga Kerja Perempuan IMK di Pulau Jawa (Jiwa)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi

2.678.590 jiwa. Hal ini disebabkan karena karena gelombang kedua pandemi dan penerapan pembatasan yang lebih ketat, yang menyebabkan banyak usaha tutup atau mengurangi tenaga kerja. Tenaga kerja perempuan yang bekerja atau berusaha di usaha IMK sebanyak 4.403.713 tenaga kerja atau 46,76 persen dibandingkan total tenaga kerja IMK secara keseluruhan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah perkembangan teknologi. IMK hingga saat ini masih dikategorikan sebagai usaha informal dengan produktivitas dan penggunaan teknologi rendah. Meskipun sudah mulai memiliki kemampuan berinovasi dan mengembangkan teknologi produksi (BPS, 2023). Adapun perkembangan IP-TIK di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut:



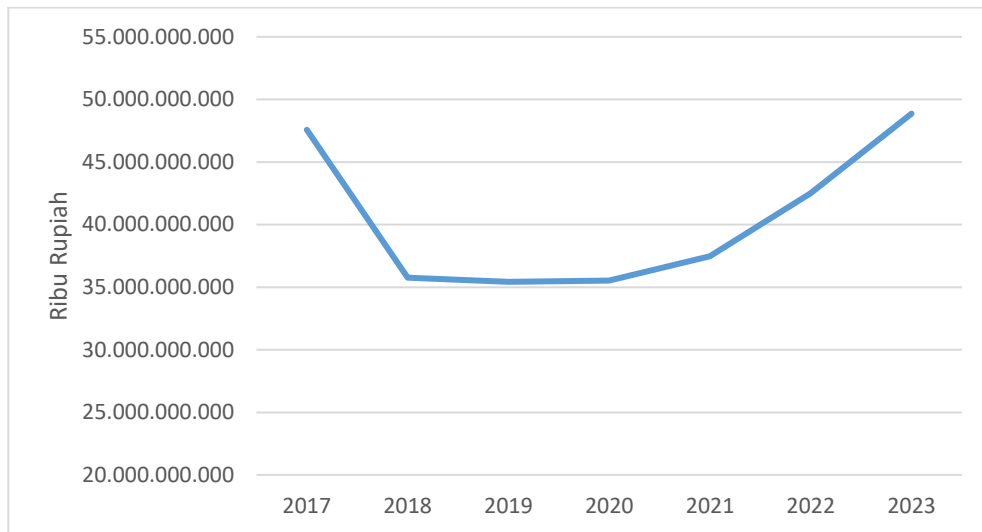
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.4

Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4, perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) setiap provinsi di Pulau Jawa cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. DKI Jakarta termasuk provinsi dengan tingkat IP-TIK tertinggi di Pulau Jawa, itu berarti bahwa DKI Jakarta didorong oleh pencapaian tiga sub-indeks pembangunan TIK yaitu sub-indeks akses dan manufaktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian yang terbilang cukup baik. Kemudian tingkat IP-TIK terendah ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, hal ini karena Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang rata-rata masyarakatnya masih konvensional atau kental dengan adat istiadat (BPS, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Balas Jasa. Tambunan (2019) menyatakan 42,84 persen usaha IMK dimiliki oleh perempuan meskipun perbandingan antara pengusaha perempuan dan laki-laki bervariasi antar provinsi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kemiskinan merupakan hal yang mendasari terus tumbuhnya usaha IMK. Perempuan yang memiliki usaha IMK terpaksa untuk menjalankan usaha agar dapat memperoleh uang tambahan untuk bertahan hidup. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rodhyah (2013) yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja di Industri Mikro Kecil bertujuan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Perempuan juga masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, yang menyebabkan kurang produktif untuk memajukan usaha sehingga memperkecil pendapatan yang diperoleh dan membuat ketidakpastian kelangsungan Industri Mikro Kecil. Berikut pada gambar 1.4 merupakan data perkembangan balas jasa Industri Mikro Kecil di Pulau Jawa tahun 2017-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.5

**Perkembangan Balas Jasa pekerja Industri Mikro Kecil di Pulau Jawa
Tahun 2017-2023 (Ribu Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5, dapat dilihat bahwa balas jasa pekerja IMK di Pulau Jawa pada awal tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2019. Penurunan balas jasa pekerja di industri mikro dan kecil (IMK) di Pulau Jawa pada periode 2017 hingga 2019 kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keterbatasan modal di sektor ini. Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan bagian dari industri manufaktur yang dikenal karena sifat usahanya yang padat karya dan minim modal sehingga berdampak pada kemampuan usaha IMK untuk memberikan upah yang kompetitif kepada pekerjanya (BPS, 2023).

Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2023, Balas Jasa pekerja IMK terus mengalami peningkatan. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan *online* lebih kuat

dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan *offline*. Pasca pandemi *Coronavirus disease 2019* (Pandemi COVID-19) UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para Pelaku UMKM mulai terbuka pada tata Kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, *marketplace*, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital, yang membawa pengaruh signifikan dalam *income* mereka (Melati, 2022).

Penelitian terkait penyerapan tenaga kerja perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Anandika (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel PDRB, Balas Jasa Pekerja, dan Rata-rata lama sekolah. Hasil penelitian tersebut adalah Balas Jasa Pekerja dan Rata – Rata Lama Sekolah bersama – sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto tidak memiliki pengaruh signifikan kepada Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Industri Mikro dan Kecil di provinsi pada Pulau Sumatera Tahun 2017 – 2022.

Rahmadiannor (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel Jumlah Unit Usaha, Investasi, dan Nilai Produksi. Hasil Penelitian tersebut adalah Unit usaha, investasi, dan nilai produksi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil di Kota Banjarmasin. Variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial hanya unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil di Kota Banjarmasin.

Ningrum (2022) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel Banyaknya usaha, output, dan upah minimum provinsi. Hasil penelitian tersebut adalah jumlah usaha memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja perempuan pada industri mikro kecil. Output memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja perempuan di usaha IMK. Sementara itu, UMP memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja perempuan di usaha IMK.

Hidayat & Ash Shidiqie (2024) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel IP-TIK, UMP, dan PDRB. Hasil penelitian tersebut adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan (PTKPR).

Davani & Sulistyaningrum (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel IP-TIK. Hasil penelitian tersebut adalah digitalisasi mampu memberikan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan Indonesia. Digitalisasi menghadirkan arus berbagai informasi ekonomi yang relevan menjadi lebih mudah sehingga meningkatkan peluang kesempatan bekerja bagi kaum perempuan makin besar.

Penelitian ini didasari oleh fenomena peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Pulau Jawa, yang diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja perempuan di Industri Mikro Kecil (IMK) di Pulau Jawa. Namun, hal ini tidak sejalan dengan Teori Ekonomi Diskriminasi yang

dikemukakan oleh Gary S. Becker (1957) dalam Novianti (2019). Becker menjelaskan bahwa diskriminasi berbasis gender dapat memperburuk akses perempuan ke pasar kerja. Terdapat dua sumber utama diskriminasi, yaitu diskriminasi berbasis selera, di mana pengusaha lebih memilih mempekerjakan laki-laki, dan diskriminasi statistik, di mana pengusaha memiliki informasi yang tidak sempurna sehingga mengasumsikan kualifikasi tenaga kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Diskriminasi ini menyebabkan perempuan kesulitan mendapatkan pekerjaan atau menerima pekerjaan dengan upah yang lebih rendah, meskipun terdapat tenaga kerja lain yang lebih produktif. Selain itu, peningkatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mencerminkan ketidaksetaraan gender, dapat mengakibatkan penurunan TPAK perempuan, karena diskriminasi menghalangi peluang kerja mereka (Novianti, 2019). Rata-rata IKG di Pulau Jawa pada tahun 2022 juga meningkat dan berfluktuasi sepanjang tahun 2017-2023. Pulau Jawa dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki jumlah IMK terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa merupakan pulau dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja yang sesuai serta berkualitas. Studi-studi yang telah dilakukan di Indonesia masih terbatas pada permintaan tenaga kerja sektor industri secara keseluruhan, sementara studi empiris yang mengkaji permintaan tenaga kerja perempuan di sektor IMK belum banyak dilakukan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan pada Industri Mikro Kecil (IMK) di Pulau Jawa Tahun 2017-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Unit Usaha IMK, IP-TIK, Balas Jasa, dan *Dummy* (COVID-19) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan IMK di Pulau Jawa tahun 2017-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Unit Usaha IMK, IP-TIK, Balas Jasa, dan *Dummy* (COVID-19) secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan IMK di Pulau Jawa tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Unit Usaha IMK, IP-TIK, Balas Jasa, dan *Dummy* (COVID-19) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan IMK di Pulau Jawa tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui Unit Usaha IMK, IP-TIK, Balas Jasa, dan *Dummy* (COVID-19) secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan IMK di Pulau Jawa tahun 2017-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Determinan penyerapan tenaga kerja perempuan di Pulau Jawa. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif tentang penyerapan tenaga kerja perempuan di Pulau Jawa, serta di wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara Unit Usaha IMK, IP-TIK, Upah, *Dummy* (COVID-19) dan penyerapan tenaga kerja perempuan di industri mikro kecil.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja perempuan pada industri mikro kecil di Pulau Jawa yang dapat dilihat dari Unit Usaha IMK, IP-TIK, Upah, dan *Dummy* (COVID-19) sebagai bahan literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai penyerapan tenaga kerja perempuan sehingga Pemerintah pada setiap provinsi di Pulau Jawa dapat mengambil kebijakan mengenai peningkatan Unit Usaha IMK, IP-TIK, Upah, dan *Dummy* (COVID-19) pada industri mikro kecil di Pulau Jawa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja perempuan pada industri mikro kecil di Pulau Jawa. Dengan memahami penelitian ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dimulai sejak bulan September 2024, dengan tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

[illegible]